

Hasanuddin: Ini Penguatan Pengawasan Keuangan



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Jumat, 12/07/2024

➤ **Ketua DPRD Kaltim Hadiri Penyampaian LHP BPK RI kepada Presiden RI**

JAKARTA – Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menghadiri acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023.

Acara yang berlangsung di Cendrawasih Room Balai Sidang Jakarta *Convention Center* (JCC), Senin (8/7/2024) tersebut mengusung tema “Menguatkan Fondasi Keuangan Negara, Menuju Indonesia Emas 2045”.

LHP LKPP Tahun 2023 diserahkan secara langsung oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Isma Yatun kepada Presiden RI Joko Widodo dengan hasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pada kesempatan itu, Hasanuddin Mas’ud mengatakan bahwa acara ini merupakan acara yang pertama kali dilakukan pemerintah pusat untuk mengumpulkan seluruh kepala daerah dan ketua DPRD seluruh Indonesia.

“Untuk menyampaikan hasil pemeriksaan BPK terhadap pemerintah pusat. Ini baru terjadi, selama ini terjadi hanya di pemerintahan saja, presiden. Tidak melibatkan seluruh lapisan,” ujar Hasanuddin ketika diwawancara usai acara.

Menurutnya, hal ini merupakan penguatan pengawasan keuangan terhadap Pemerintah Pusat untuk menghadapi Indonesia Emas 2045. Dan yang terpenting, lanjut Hasanuddin, pihak terkait dapat memastikan bahwa anggaran dapat berjalan dengan transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

“Karena ini uang rakyat katanya Pak Presiden begitu tadi, bukan uang nenek moyang kita. Ini harus dilakukan secara benar dan hati-hati, secara transparan, akuntabel, efisien, efektif dan rasa keadilan serta kepatutan,” sebut politisi partai Golkar ini.

Ia berharap agar segala kebocoran yang terjadi selama ini dapat mulai mengecil, bila perlu ditutup.

Kemudian ia juga menambahkan adanya penguatan terhadap pengawasan baik secara eksternal maupun internal.

“Di provinsi contohnya kan ada Inspektorat, itu internal, ada BPKAD itu juga internal. Kalau di eksternal di situ ada BPK, ada DPR, ada Ombudsman, dan ada KPK. Dengan adanya pengawasan ini, mudah-mudahan keuangan APBD kita itu bisa aman dan berjalan dengan baik,” katanya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo dalam sambutannya mengingatkan predikat WTP itu bukan prestasi melainkan kewajiban semua lembaga. “Saya ingin menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah, atas predikat wajar tanpa pengecualian dalam laporan keuangan pemerintah tahun ini,” kata Presiden Joko Widodo.

Presiden menekankan, penggunaan uang negara yang mengalir di pemerintah pusat hingga daerah pasti akan diaudit. Pertanggungjawaban harus dilakukan secara baik. “Kita harus merasa, setiap tahun, ini pasti diaudit. Pasti diperiksa. Jadi sekali lagi, kewajiban menggunakan APBN dan APBD secara baik. Dan juga kewajiban menjalankan APBN dan APBD secara baik, serta kewajiban mempertanggungjawabkan ya secara baik pula,” jelas Presiden Joko Widodo.

Tampak hadir, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, sejumlah menteri dari Kabinet Indonesia Maju, gubernur, bupati dan wali kota se Indonesia serta DPRD se Indonesia.

(hms8)

Sumber berita:

1. KaltimPost, Hasanuddin: Ini Penguatan Pengawasan Keuangan, 12/07/24

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU 15/2006) bahwa pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

2. Dalam Pasal 1 angka 14 UU 15/2006 dijelaskan bahwa hasil pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK.